

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan perencanaan merupakan hal fundamental yang harus dilakukan dalam proses pembangunan, karena sangat menentukan hasil akhir dari sebuah pekerjaan. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus diikuti jika menginginkan hasil yang baik.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan (Tundjung Linggarwati dkk 2021). konsep SGDs adalah agenda pembangunan global yang berkelanjutan untuk periode 2016-2030. SGDs Desa merupakan arah kebijakan yang dilakukan di desa, dalam pasal 7 Peraturan Menteri Desa diantaranya ada 18 tujuan, dan salah satu tujuannya adalah pembangunan infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang berdasarkan otonom seluas-luasnya kepada daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat (Wikipedia 2022). Melalui undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, selain urusan fiscal, keamanan, urusan luar negeri dan moneter, artinya pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan, memberikan pelayanan, melakukan pembangunan dan

pengembangan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Model penyelenggaraan pemerintahan pusat kepada daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Asas desentralisasi merupakan salah satu konsep manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kewenangan. Di dalam praktiknya desentralisasi merupakan (*Delegation of authority and responsibility*) pada unit-unit organisasi yang lebih rendah tingkatannya dalam pembuatan dan pengambilan keputusan (Miewal dalam Pamudji 1984). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan public, mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Aman Darmawan 2023).

Merujuk Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang No 06 Tahun 2014 pasal 2 tentang desa secara tidak langsung mendorong dan memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia, dan bhineka tunggal ika.

Berdasarkan kewenangannya pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan desa. Pembangunan yang dilakukan secara demokratis dengan cara melibatkan seluruh unsur yang ada di desa. Pemerintah desa bereperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilakukan sehingga manfaat pembangunan bisa diketahui dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa.

Berbagai wilayah teritorial di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan, karena sifat

pundamentalnya yang membuka peluang aksesibilitas sosial dan ekonomi untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, untuk perkembangan pembangunan ekonomi, tanpa adanya sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur yang layak, masyarakat akan kesulitan untuk melakukan berbagai proses transaksi penjualan hasil panen antar desa maupun antar kota.

Infrastruktur yang memadai dapat menaikkan mobilitas masyarakat secara menyeluruh, sehingga proses perekonomian berjalan secara maksimal (Amin Nasrulloh dkk 2023). Infrastruktur memiliki peran positif dalam menciptakan lapangan kerja jangka pendek, sebagai pendukung meningkatnya efisiensi serta efektivitas dalam sector terkait, infrastruktur dalam hal tersebut meliputi jalan, jembatan, pengairan dan lainnya (Wulan Puspita Dewi dkk 2023).

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik di desa. Pertama, terbatasnya anggaran desa yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur fisik. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang teknis pembangunan infrastruktur fisik. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat Hidayatulloh jamaludin (2022) yang terakhir yaitu lemahnya kegiatan transparansi pengelolaan keuangan anggaran, yang dilakukan oleh pemerintah desa. (Lestari 2022)

Salah satu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*Goodgovernance*) mensyaratkan harus adanya sikap transparansi dari para penyelenggara pemerintah. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan adanya ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan public yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, tujuan yang lain dengan adanya transparansi dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu pihak (Nurisna dkk 2023). Transparansi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus transparan kepada masyarakat baik dalam urusan anggaran, perumusan kebijakan public dan implementasinya (Joko Widodo 2001).

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) bagi berlangsungnya kegiatan pemerintahan di desa, salah satunya pelaksanaan pembangunan desa. SDM yang baik sangat berpengaruh, karena menurut penelitian sebelumnya sumber daya manusia (SDM) merupakan aset bangsa untuk membangun perekonomian bangsa, artinya suatu bangsa dan susunan pemerintahan terendah yaitu desa akan maju dan berkembang tergantung dari sumber daya manusianya baik masyarakat ataupun pemerintah yang mampu mengolah sumber daya alam (SDA) dengan baik sehingga bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Kepala Desa merupakan penyelenggara urusan rumah tangga desa, penyelenggara pemerintahan desa, dan mewakili desa sebagai badan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut masyarakat desa, kepala desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur perwakilan/stake holder yang ada di desa. Meskipun kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, tapi di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang, dalam artian ia tidak menjalankan tugasnya atas kehendak dirinya sendiri. (Aries Djaenuri 2001).

Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengelola anggaran desa dan mengambil keputusan strategis terkait pembangunan infrastruktur fisik di desa. Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seorang Kepala desa diuntut untuk menjalankan kinerjanya dengan baik. Yaitu melaksanakan tugasnya menjadi seorang pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepemimpinan merupakan suatu kapasitas yang mempunyai kemampuan atau hak untuk mengarahkan membimbing atau mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kebijaksanaan atau perintah. Kepemimpinan merupakan suatu seni untuk bisa mempengaruhi orang lain agar

mengikuti apa yang di inginkan. Keberhasilan suatu pembangunan desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, hal yang paling penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa adanya peran serta masyarakat di dalam proses tersebut.

Dengan kepemimpinan kepala desa dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, hal pembangunan perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (*public*) dan kesejahteraan masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di Desa tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Desa Talagasari merupakan salah satu Desa yang terletak di daerah Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Banjarwangi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya. Desa Talagasari memiliki kontur bonus demografi perbukitan dan pegunungan yang mempunyai potensi yang cocok untuk kegiatan pertanian, peternakan dan wisata. Secara umum, kondisi Desa Talagasari memiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, karena Desa Talagasari terletak di antara jalur penghubung antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan observasi sementara, potensi-potensi tersebut belum seluruhnya bisa dimanfaatkan dan digali oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Rendahnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini terlihat dari status pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Berdasarkan catatan yang diperoleh dari kantor Desa Talagasari bahwa hampir sekitar 70% masyarakat Desa Talagasari berstatus sebagai karyawan buruh yang tinggal di ibu kota Provinsi Jawabarat.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan pertanggung jawaban.

Berdasarkan data sistem keuangan Desa Talagasari pada tahun anggaran 2022 pemerintah desa melakukan kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan melalui alokasi dana desa, bantuan provinsi, bagi hasil pajak, pendapatan lain yang sah serta transfer dari pemerintah pusat (APBN) adalah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .1.1

RAPB Des Talagasari

Tahun Anggaran 2022

	Bidang Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :				
	1. Pembangunan Gedung Sanggar Pencak Silat	1 Unit	172.500.000	172.500.000	100%
	2. Pengadaan Sarvas Penanganan Penyebaran Covid	1 paket	50.367.000		0%
	3. Pembangunan Sarana Posyandu	1 unit	50.000.000		0%
	4. Pembangunan Jalan rabat beton jaling desa di Tujuh Titik	854 m	116.160.000	116.160.000	100%
	5. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Empat Titik	460 m	29.040.000	29.040.000	100%
	6. Pembangunan Mck di Dua Titik	2 unit	16.625.000	16.625.000	100%
	7. Pemeliharaan Prasarana Desa	1m peregi	413.000.0000	354.000.000	85%
	8. Pengadaan lumbung padi	1 unit	100.000.000		0%
		2000m	100.000.000	100.000.000	100%

	Bidang Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi	Capaian
	9. Pembuatan saluran irigasi		1.047.692.000	788.325.000	65,%
	Bidang pemberdayaan masyarakat				
	10. Pelatihan teknologi tepat guna	30 orang	126.534.000	126.534.000	100%
	11. Bantuan pertanian	3 paket	10.000.000	10.000.000	100%
	12. Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa	1 orang	20.000.000	20.000.000	100%
	Bidang penanggulangan bencana darurat				
	13. Bantuan BLTDD	240KK	864.000.000	648.000.000	76,5%
	Ket :				
	1. Bidang pembangunan		1.047.692.000	788.325.000	65,%
	2. Bidang pemberdayaan masyarakat		156.534.000	156.534.000	100%
	3. Bidang penanggulangan bencana darurat		846.000.000	648.000.000	76,5%
	Total APBDes		2.152.266.000	1.592.859.000	74%

sumber: Siskeudes Data Desa Talagasari Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dari seluruh dana APBDesa Talagasari tahun 2022 yang tersedia yaitu 2.152.266.000. Di anggarkan untuk kegiatan pembangunan adalah sebesar 1.047.692.000 dan sampai akhir tahun hanya realisasi 788.325.000 atau sekitar 65% dari total dana yang dianggarkan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, Desa Talagasari menganggarkan dana sebesar 156.534.000 dan kegiatan ini realisasi 100% dari total dana yang dianggarkan. Kegiatan bidang penanggulangan darurat bencana melalui program BLTDD pemerintah Desa Talagasari menganggarkan 846.000.000. hingga akhir tahun 2022

kegiatan ini hanya realisasi 648.000.000 atau realisasi 76% dari total dana yang dianggarkan dalam APBDesa.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur fisik sudah berjalan namun belum efektif dan kegiatan pembangunan belum mementingkan prioritas dan nonprioritas. Serta masih ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak di realisasikan. Berdasarkan tabel di atas kegiatan pembangunan fisik hanya tercapai 65% dari total dana yang dianggarkan.

Berdasarkan pengamatan penulis tidak tercapainya pembangunan fisik yang dilakukan oleh Desa Talagasari disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertama kurangnya komitmen kepala desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan yang dilakukan, hal demikian diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agus Farman selaku masyarakat Desa Talagasari, pada tanggal 28 Juni 2023 mengenai kepemimpinan Kepala Desa Talagasari yang menjabat pada periode saat ini, mengenai pembangunan fisik, dengan jawaban sebagai berikut :

“menurut saya kepemimpinan yang sekarang untuk masalah pembangunan memang ada realisasi, namun belum merata dan belum berdasarkan aspirasi yang diminta oleh masyarakat, sehingga sebagian masyarakat ada yang merasa diperlakukan tidak adil, karena merasa ada daerah yang di anak tirikan, jadi silahkan adek simpulkan sendiri kepemimpinan saat ini seperti apa dalam hal pembangunan” (Wawancara AF 28 Juni 2023).

2. kepemimpinan Kepala Desa dalam membangun desa tersebut belum bertanggung jawab secara menyeluruh, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis yang ditanyakan kepada salah satu Tokoh Pemuda Desa Talagasari yaitu Bapak Yusman Sulaiman pada tanggal 29 Juni 2023 tentang kepemimpinan dengan jawaban sebagai berikut :

“kepemimpinan yang saat ini menjabat, sudah tiga tahun menjabat tapi belum ada perubahan sama sekali, terutama masalah pembangunan jalan utama desa yang menghubungkan Desa Talagasari dengan Desa Banjarwangi masih dalam keadaan rusak parah” (Wawancara YN 29 Juni 2023).

3. Ketiga tidak adanya komunikasi, koordinasi dan sosialisasi seorang pemimpin (kepala desa) seputar kebijakan mengenai pembangunan fisik yang dilakukan di Desa Talagasari, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada kepada Bapak H. Ajengan Odi selaku Ketua RT Dusun Kepunuhan 01 dengan jawaban sebagai berikut:

“kepemimpinan yang saat ini menjabat dalam masalah pembangunan yang hari ini dilakukan itu tidak ada keterbukaan dan komunikasi dengan kami sebagai masyarakat yang ada, dan kami juga menilai bahwa aspirasi-aspirasi dari kami yang diberikan kepada pemerintahan yang saat ini menjabat itu cenderung diabaikan” (Wawancara HDI 30 Juni 2023).

4. Faktor yang keempat penyebab tidak tercapainya pembangunan di Desa Talagasari adalah karena seorang pemimpin Kepala Desa tidak mampu membuat keputusan yang baik dalam hal perencanaan pembangunan, sesuai dengan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kaur Perencana Desa Talagasari Bapak Asep Koswara mengenai tidak tercapainya pembangunan yang dianggarkan, dengan jawaban sebagai berikut :

“iya menurut saya a itu kenapa tidak tercapai, dan ada beberapa yang tidak direalisasikan karena dalam perencanaan memang tidak di rencanakan dengan baik, boleh dikatakan kurangnya pelibatan masyarakat a, sehingga dengan terpaksa ada beberapa yang sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan untuk direalisasikan di tahun yang akan datang” (wawancara AK 05 juni 2023)

5. Tidak adanya monitoring kontrol yang dilakukan kepemimpinan Kepala Desa dalam proses penganggaran hingga realisasi APBDesa sehingga terjadi mal administrasi di Desa tersebut, terkait hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu mantan Sekdes Desa Talagasari Bapak Uban Soebari pada tanggal 07 Juni 2023 dengan jawaban sebagai berikut :

“menurut saya terkait dengan pembangunan kenapa tidak bisa tercapai, sebetulnya anggaran memang ada dan turun, namun setahu saya Desa tersebut menyimpan segudang permasalahan diantaranya adalah hutang-hutang, yang terkadang anggaran yang turun dipakai dulu untuk menutupi hutang-hutang tersebut dan tidak di realisasikan untuk kegiatan apalagi kegiatan pembangunan” (wawancara USB 08 juli 2023)

Melalui permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Talagasari Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Talagasari dalam pembangunan fisik Desa Talagasari Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut?
2. Faktor apakah yang menjadi hambatan Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi kepemimpinan Kepala Desa Talagasari Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut dalam pembangunan fisik.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik .
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik.

1.4 Signifikansi dalam Penelitian

Menurut penelitian sebelumnya, signifikansi penelitian didefinisikan sebagai dampak dari pencapaian tujuan penelitian. Signifikansi penelitian terdiri dari signifikansi akademis yang berkaitan dengan kemajuan ilmu atau kegunaan teoritis dan signifikansi praktis yang berkaitan dengan membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang terkait dengan subjek penelitian.

1.4.1. Signifikansi Akademik

Penelitian terdahulu terkait dengan gaya kepemimpinan yang menganalisis peranan Kepala Desa dalam upaya mempercepat pembangunan Desa telah banyak dilakukan, dan dijadikan rujukan di dalam penelitian ini, kajian pustaka yang

dijadikan rujukan di dalam penelitian ini terdiri dari jurnal diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Trisusanti Lamangida dkk pada tahun 2017 dan permasalahan yang diangkatnya adalah “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai pemimpin resmi di desa dan berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan mediator sangat penting untuk keberhasilan program dan rencana pembangunan. Oleh karena itu, seorang kepala desa harus melakukan dan menjalankan fungsi ini dalam rangka pengembangan dan pembangunan desa. Selain itu, sebagai administrator pemerintah, masyarakat, dan pembangunan, kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, seorang kepala desa harus cakap, jujur, bijaksana, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola pemerintahan desa dan memiliki perangkat desa yang baik.
2. Penelitian yang dilakukan Oleh Dewi Triana analisis pada tahun 2018 tema yang diangkat adalah mengenai ”Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di Desa Koto Ranah, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, dapat dianggap “Cukup Baik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menyarankan semua orang di Desa Koto Ranah, termasuk pemerintah desa, untuk terus bekerja sama untuk mengubah Desa Koto Ranah menjadi desa yang maju.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Mahyana pada tahun 2013 dengan tema Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Raubun Kabupaten Kutai Timur, permasalahan yang diangkat yaitu analisi mengenai peranan kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa. Dengan hasil penelitian peranan kepala Desa di Desa Bumi Rampak sudah berjalan dengan baik, Kepala Desa selaku Pemerintah Desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan

fungsinya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau pembangunan program Desa yang sudah berjalan hingga saat ini. Pemerintah Desa siap menampung aspirasi masyarakat di Desa Bumi Rampak, agar Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan rencana.

4. Penelitian Okta Hendrik pada tahun 2017 tentang “Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau” penelitian ini untuk mengetahui peranan kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepala Desa sangat berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa, namun ada faktor yang menjadi penghambat kepala Desa di dalam menyelenggarakan programnya yaitu kesadaran masyarakat di dalam membangun desanya sehingga keterlibatan masyarakat di dalam membangun desa sangat minim, dan faktor hambatan yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana Desa (teknologi computer) dan hambatan yang terakhir adalah rendahnya pendidikan masyarakat desa dan mengakibatkan kekurangan SDM yang dibutuhkan Kepala Desa Tanjung Keranjang.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Kumalasari pada tahun 2016 dengan tema yang diangkatnya mengenai ”Pemimpinan Kepala Desa Ciamis Dalam Pembangunan Desa” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kepemimpinan yang digunakan di Desa Ciamis tidak memiliki dukungan dan arahan yang jelas dari kepala desa dalam memberikan arahan dan perintah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dalam kepemimpinan situasional, delegasi adalah perilaku seorang pemimpin yang tidak memberikan dukungan atau instruksi yang cukup. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembangunan Desa Ciamis belum mencapai tingkat yang optimal dalam menyelesaikan pembangunan yang ada di desa, seperti jalan, gorong-gorong, dan balai desa. Selain itu, pembangunan fisik Desa Ciamis belum berjalan dengan baik, yang menyebabkan Desa Ciamis masuk ke dalam kategori desa membangun (IDM) yang sangat tertinggal.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Drajat Anis Saputra pada tahun 2023 dengan tema Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan di desa tersebut, kepala desa dalam mempengaruhi bawahannya dan juga masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan di Desa tersebut menggunakan gaya otokratis, yang dimana kepala desa dalam membangun desanya hanya memprioritaskan orang-orang yang memilihnya waktu pelaksanaan pilkades, yang dimana pembangunan dilakukan atas dasar kemauannya sendiri tanpa memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Saputra pada tahun 2020 dengan tema Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Santu'un Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan infrastruktur Desa Santu' un telah dilakukan dengan baik. Namun, dana pemerintah yang diberikan secara bertahap dan implementasi yang buruk dari beberapa program menghalangi peran kepala desa.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Caselia pada tahun 2020 dengan tema penelitian Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kampung Baru Kecamatan GunungToar Kabupaten Kuantan Singingi dikategorikan baik berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diberikan kepada responden, yang terdiri dari Sekretaris Desa, BPD, Kaur Pembangunan, dan tokoh masyarakat. Secara keseluruhan, peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan fisik adalah baik.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Siboro R H pada tahun 2022 dengan mengangkat tema Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dengan hasil

penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan upaya yang dilakukan secara efektif memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan pada tahun 2021 dengan mengangkat tema Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dengan hasil penelitian peranan kepala desa belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan program jangka menengah yang mengakibatkan program-program yang direncanakan banyak yang belum realisasi tepat waktu, namun Kepala Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan cara menjalankan pembangunan sesuai dengan rencana. Namun dalam pelaksanaannya belum melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut. kepala Desa tersebut sudah menjalankan salah satu tugasnya dengan baik yaitu melakukan pengawasan terhadap realisasi pembangunan namun belum melakukan pengawasan secara tidak langsung.

Dari sepuluh rujukan penelitian diatas, peneliti melihat bahwa penelitian dengan tema kepemimpinan Kepala Desa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik sudah banyak dilakukan. Peneliti melihat, penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus terhadap peranan, fungsi serta gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Peneliti melihat tidak ada yang secara lebih rinci menyajikan dan membahas mengenai faktor penghambat dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Kepemimpinan Kepala Desa. Dengan adanya kesenjangan penelitian ini, maka kebaruan penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah menyajikan secara lebih rinci mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik. Serta untuk melihat upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sehingga bisa menemukan jawaban terkait dengan masalah penelitian.

1.4.2. Signifikasi Praktis

1. Bagi Peneliti

Maksud dilakukan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi, serta menjadikan penelitian ini untuk menambah cakrawala wawasan intelektual mengenai kepemimpinan Desa dalam upaya mempercepat pembangunan Desa.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran kepala desa dalam pembangunan fisik di Desa Talagasari, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut.

3. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Garut dan aparatur Desa Talagasari Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut karena dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah kepemimpinan kepala desa yang berkaitan dengan pembangunan fisik di Desa Taagasari Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.

4. Bagi Universitas Islam“45”Bekasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang relevan khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, selain daripada itu penelitian ini bisa digunakan untuk bahan kajian dan pengembangan oleh Progam Studi Ilmu Pemerintahan

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub-sub pembahasan dengan sistematik penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini disajikan perspektif teoritik, Definisi, Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai pradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan gambaran umum tentang objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi akademik, dan rekomendasi praktis serta saran untuk penelitian ini.

